BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak atas pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu kunci dalam mencapai kehidupan yang berkualitas karena memiliki peran dan pengaruh yang sangat besar dalam mendorong kemajuan individu dan masyarakat. Pendidikan tinggi dipandang sebagai kunci untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mendorong kemajuan manusia, termasuk kemajuan sosial dan ekonomi. Laporan *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Global Education Monitoring Report* di tahun 2017 menunjukkan adanya peningkatan pendaftaran di pendidikan tinggi di seluruh dunia. Antara tahun 2000 dan 2014, jumlah mahasiswa di institusi pendidikan tinggi meningkat dari 100 juta menjadi 207 juta. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tinggi sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan pengembangan pribadi mampu meningkatkan kehidupan yang berkualitas.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, salah satu tujuan pendidikan tinggi adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Perguruan tinggi mampu mendorong peningkatan kesejahteraan warga negaranya. Keberadaan perguruan tinggi yang berkualitas yang dapat diakses masyarakat akan meningkatkan tingkat sumber daya manusia dan kualitas hidup secara keseluruhan. Winters (2011, hlm.449) menyatakan bahwa kualitas hidup di suatu daerah dipengaruhi secara positif oleh tingkat sumber daya manusia setempat dan institusi pendidikan tinggi. Sementara bagi Gaus dkk. (2019, hlm.92) pendidikan tinggi dipandang sebagai media untuk meningkatkan daya saing ekonomi suatu negara agar semakin tinggi di seluruh dunia.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa Penyandang Disabilitas merupakan setiap orang yang

mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Sejak Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, terdapat 11 kebijakan yang lahir setelah undang-undang tersebut. Dilihat dari kebijakan terkait pemenuhan hak pendidikan tinggi Penyandang Disabilitas, selain Undang-undang Dasar 1945, terdapat 21 peraturan pemerintah yang diberlakukan di tingkat nasional sejak tahun 1945.

Meskipun negara telah mengakui hak Penyandang Disabilitas melalui berbagai kebijakan, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan peraturan-peraturan lainnya, implementasi kebijakan ini dalam konteks pendidikan tinggi masih menghadapi sejumlah tantangan. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2018 hanya 2,8% Penyandang Disabilitas yang mengakses perguruan tinggi. Kauffman dkk (2023, hlm.2) menegaskan bahwa disabilitas memiliki cakupan yang luas dan mencakup kondisi fisik, mental, dan psikologis yang tampak maupun yang tidak terlihat dan sebagai salah satu jenis keragaman, disabilitas merupakan keragaman yang harus dihargai di seluruh jenjang pendidikan termasuk di pendidikan tinggi, baik di kalangan mahasiswa maupun di kalangan fakultas. Dalam perjalanan hidup seorang Penyandang Disabilitas, pendidikan tinggi merupakan sebuah langkah penting dan mewakili sebuah langkah signifikan dalam perjalanan hidup Penyandang Disabilitas Cesarei (2014, hlm.71). Pendidikan tinggi telah diidentifikasi sebagai faktor penting dalam memfasilitasi transisi Penyandang Disabilitas ke dunia kerja (Vedeler & Mossige, 2010, hlm.269). Sementara menurut Madhesh (2023, hlm.1) pendidikan pada umumnya, dan pendidikan tinggi secara khusus, meningkatkan kualitas hidup para Penyandang Disabilitas. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Prowse (2009, hlm. 89) terhadap 44 Penyandang Disabilitas menemukan bahwa gelar dari perguruan tinggi mampu membantu para mahasiswa Disabilitas untuk bisa mendefinisikan kembali diri mereka sendiri dan memvalidasi kembali

identitas yang dalam tingkat pendidikan mereka sebelumnya tidak mereka dapatkan.

Sementara dalam laporan penelitian Perkumpulan PRAKARSA (2022) menuliskan bahwa kondisi angkatan kerja disabilitas di Indonesia didominasi lulusan Sekolah Dasar dan hal ini tentu saja memperlemah daya saing Penyandang Disabilitas di dunia kerja. Hal ini sejalan dengan temuan Riswari, dkk (2022, hlm.160) di mana kurangnya akses ke pendidikan tinggi bagi Penyandang Disabilitas mengakibatkan rendahnya sumber daya Penyandang Disabilitas sehingga Penyandang Disabilitas tidak mampu mengembangkan potensi dirinya secara maksimal dan berkontribusi penuh kepada masyarakat karena terbatasnya akses pendidikan yang merupakan faktor penting dalam membentuk sumber daya manusia.

Pentingnya pendidikan tinggi bagi Penyandang Disabilitas mendorong perlunya upaya menemukan strategi dalam menerima dan memberikan layanan pendidikan tinggi yang inklusif. Komisi Nasional Disabilitas (KND) sebagai salah satu Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) dibentuk pada 1 Desember 2021 merupakan salah satu wujud nyata komitmen negara Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak Penyandang Disabilitas termasuk hak pendidikan tinggi. KND melakukan beberapa pendekatan dalam upaya pemenuhan hak pendidikan tinggi bagi Penyandang Disabilitas. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui kegiatan advokasi melalui diskusi terpumpun atau sarasehan perguruan tinggi di Kabupaten dan Kota di Indonesia. Dalam sarasehan tersebut, diundang para pejabat atau pemimpin universitas yang pendapatnya, pandangannya, dan aspirasinya menentukan arah kebijakan dan universitas mengenai disabilitas dan mengimplementasikannya.

Kegiatan sarasehan dilakukan untuk menangkap potret penyelenggaraan pendidikan tinggi bagi Penyandang Disabilitas sehingga didapat beragam perspektif dari para pemangku dan/ atau pengambil kebijakan di perguruan tinggi. Pada kegiatan sarasehan tersebut KND memberikan materi pemantik berupa amanat Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 mengenai terkait pemenuhan hak-hak pendidikan, termasuk pendidikan tinggi. Seluruh rangkaian kegiatan dicatat dalam

notulensi. Notulensi merupakan bagian penting dari sebuah pertemuan sering diabaikan setelah pertemuan selesai dilakukan. Penelitian terkait penggalian data melalui notulensi masih terbatas khususnya notulensi yang berelasi pada penggalian akar permasalahan dan dampaknya pada regulasi atau kebijakan. Schwartz-Ziv & Weisbach (2013, hlm.349) meneliti data notulensi untuk menganalisis *database* yang unik dari rapat dewan dan rapat dewan-komite dan menggunakan data tersebut untuk mengevaluasi asumsi dan prediksi yang mendasari model dewan direksi. McEachern (1998, hlm.198) melakukan penelitian terhadap notulensi rapat dan meneliti bagaimana seorang administrator di sebuah organisasi teater memanipulasi bahasa dengan menggunakan notulen rapat dewan direksi untuk memengaruhi anggota dewan agar memilih untuk membubarkan organisasi. Oleh karena itu, penting untuk terus menggali dan memanfaatkan notulensi sebagai alat untuk evaluasi dan perbaikan kebijakan pendidikan tinggi, sehingga hak-hak Penyandang Disabilitas dapat terpenuhi secara optimal. Penggunaan data notulensi ini diharapkan dapat mendorong terciptanya kebijakan yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan semua pihak, terutama mereka yang memiliki keterbatasan dalam akses pendidikan.

Permasalahan yang dibahas dalam latar belakang ini adalah meski berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan lembaga pendidikan untuk memastikan bahwa pendidikan tinggi dapat diakses oleh semua pihak, termasuk Penyandang Disabilitas, namun, masih terdapat beberapa masalah mendasar yang perlu diidentifikasi dan dicari solusinya, antara lain terkait dengan kebijakan yang ada, kondisi implementasinya di lapangan, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi bagi Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memotret sejauh mana kebijakan pendidikan tinggi untuk Penyandang Disabilitas diimplementasikan, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi implementasinya, serta strategi yang dapat diadopsi oleh perguruan tinggi dalam mewujudkan inklusi pendidikan tinggi bagi Penyandang Disabilitas.

Hal ini selaras dengan pernyataan Morña, (2016) di mana semakin banyaknya siswa Penyandang Disabilitas yang berhasil menyelesaikan sekolah usia

dini mereka, kebutuhan akan praktik inklusif dalam pendidikan tinggi menjadi semakin penting. Sementara Maslikhova dkk (2020, hlm.527) menyatakan inklusi memungkinkan setiap orang untuk berpartisipasi secara setara dalam semua proses sosial, di semua tingkat pendidikan, dalam kegiatan rekreasi, di tempat kerja, dan dalam pelaksanaan berbagai peran dan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan mengambil data dari kegiatan diskusi terpumpun dan wawancara tertulis dengan perguruan tinggi serta mahasiswa disabilitas, penelitian ini bertujuan untuk menangkap potret penyelenggaraan pendidikan tinggi yang menuju inklusif secara khusus yang berhubungan dengan mahasiswa Penyandang Disabilitas, serta memberikan wawasan yang mendalam dan komprehensif mengenai penyelenggaraannya, faktor-faktor pendukung dan penghambatnya serta menemukan bagaimana strategi untuk membangun perguruan tinggi yang inklusif di Indonesia. Peneliti melakukan penelitian tentang “Potret Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi bagi Penyandang Disabilitas dalam Rangka Membangun Perguruan Tinggi yang Inklusif”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan, maka pertanyaan penelitian ditetapkan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kondisi kebijakan dan implementasi pendidikan tinggi bagi Penyandang Disabilitas di perguruan tinggi?
2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan pendidikan tinggi bagi Penyandang Disabilitas di perguruan tinggi di Indonesia?
3. Bagaimanakah rancangan strategi untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan tinggi bagi penyandang disabilitas dalam rangka membangun perguruan tinggi yang inklusif?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mendalami serta menangkap kesenjangan terkait pendidikan tinggi yang inklusif dengan menggali permasalahan mendasar dan mengakar. Masalah yang dikaji untuk memahami

praktik penyelenggaraan pendidikan tinggi bagi Penyandang Disabilitas dengan mengidentifikasi dan mengkaji data-data penelitian ini. Hal ini dilakukan agar setiap kebijakan yang dibuat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan. Dengan demikian fokus penelitian ini adalah menggali kebijakan, praktik, dan hasil terkait pemenuhan hak pendidikan tinggi Penyandang Disabilitas dan melihat kesenjangannya serta faktor-faktor yang menyebabkan masih rendahnya jumlah Penyandang Disabilitas yang dapat mengakses pendidikan tinggi. Penelitian ini juga bertujuan untuk memotret sejauh mana pendidikan tinggi di Indonesia dapat menciptakan inklusi dan keberagaman yang berkelanjutan.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan:

1. kondisi kebijakan dan implementasi pendidikan bagi Penyandang Disabilitas di perguruan tinggi termasuk pengaruhnya pada inklusi dan keberagaman dalam sistem pendidikan tinggi.
2. gambaran faktor-faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan pendidikan tinggi yang inklusif, melalui data yang komprehensif dan objektif mengenai kondisi di perguruan tinggi.
3. rumusan strategi penyelenggaraan pendidikan tinggi yang inklusif yang dapat dijadikan pedoman atau acuan dalam memastikan pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak pendidikan tinggi Penyandang Disabilitas.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam mengenai kondisi inklusi di perguruan tinggi dengan mengkaji aspek budaya, kebijakan, dan praktik yang ada. Temuan penelitian ini dapat dijadikan rujukan teoritis serta kerangka berpikir dalam merancang dan mengimplementasikan pendidikan tinggi yang inklusif dan bermutu bagi Penyandang Disabilitas. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan mendorong terbitnya regulasi atau kebijakan yang lebih mendukung pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak-hak Penyandang Disabilitas di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini menjadi referensi bagi perguruan tinggi dalam mewujudkan kampus inklusif. Penelitian ini dapat membantu rektor dalam merumuskan kebijakan dan program yang menekankan pada inklusi dan keberagaman. Penelitian ini dapat dijadikan landasan dalam memastikan penyediaan dukungan dan pemberian akomodasi yang layak bagi mahasiswa disabilitas. Selain itu, penelitian ini memberikan masukan yang berguna bagi Unit Layanan Disabilitas (ULD) perguruan tinggi dalam rangka membangun lingkungan pendidikan tinggi yang inklusif dan beragam, serta memastikan pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak pendidikan tinggi Penyandang Disabilitas.

1.5 Struktur Organisasi Disertasi

Disertasi ini dibuat dalam struktur yang memudahkan untuk memahami rangkaian yang secara keseluruhan terkait satu dengan yang lain. Pada Bab I Pendahuluan, peneliti menuliskan gambaran umum mengenai pendidikan tinggi di Indonesia, kemudian mengidentifikasi kesenjangan serta merumuskan masalah penelitian yang merupakan hasil dari identifikasi yang dipaparkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang membantu membatasi penelitian ini. Pada bab yang sama juga ditemukan tujuan dan manfaat penelitian ini dan juga struktur organisasi penelitian.

Pada Bab II Kajian Pustaka, peneliti menjelaskan mengenai kajian-kajian teoretis yang mendukung penelitian yang dimulai dari konsep dasar tentang disabilitas, model disabilitas, perubahan dari pendidikan luar biasa menuju pendidikan inklusif, penelitian terdahulu tentang pendidikan tinggi untuk penyandang disabilitas, dan kerangka konsep analisis.

Pada Bab III Metode Penelitian, peneliti memaparkan desain penelitian sebagai acuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai subjek penelitian, lokasi penelitian, lokasi penelitian, cara pengumpulan data-data serta bagaimana data-data yang dikumpulkan dianalisis untuk dapat menjawab permasalahan penelitian dan juga mencapai tujuan dari penelitian itu sendiri.

Temuan dari data-data dipaparkan pada Bab IV. Pada bab ini ditemukan penjelasan lebih lanjut mengenai kebijakan dan implementasi pendidikan tinggi bagi Penyandang Disabilitas, potret penyelenggaraan pendidikan tinggi bagi Penyandang Disabilitas, dan faktor-faktor pendukung dan penghambat yang paling mendasar dalam proses penyelenggaraan pendidikan tinggi bagi Penyandang Disabilitas yang menjadi acuan dalam rumusan rancangan strategi memastikan penyelenggaraan pendidikan tinggi bagi Penyandang Disabilitas dalam rangka membangun perguruan tinggi yang inklusif. Pada bab yang sama dibahas mengenai temuan-temuan berdasarkan paparan pada Bab IV.

Sementara pada Bab V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi, peneliti menyampaikan simpulan yang hasil jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dikaji secara mendalam. Pada bab yang sama juga dipaparkan implikasi dari hasil penelitian terhadap aspek-aspek temuan dan para subjek penelitian, serta rekomendasi yang diberikan terhadap setiap lembaga, pemangku kebijakan, dan para peneliti lain yang memiliki keterkaitan dan hubungan dengan penelitian yang dilakukan.